

KATA PENGANTAR

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten merupakan penjabaran dari hasil pelaksanaan anggaran pada masing-masing kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi

Banten periode Tahun Anggaran 2020 sebagai laporan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Provinsi Banten, guna memberikan gambaran tentang capaian realisasi anggaran dan capaian kinerja sesuai dengan tolok ukur dan target kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sampai dengan Semester I (Triwulan II) Tahun Anggaran 2020.

Semoga laporan yang kami sajikan ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Daerah pada Semester I Tahun Anggaran 2020 serta sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten.

Kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI BANTEN,**

Ir. Hj. ENENG NURCAHYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620825 198704 2 001

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan Atas Laporan Keuangan Triwulan II (Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis) Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, Juli 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN
PERSANDIAN PROVINSI BANTEN,

Ir. Hj. ENENG NURCAHYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19620825 198704 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.....	4
BAB II INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	6
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD.....	9
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten	9
3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	14
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	15
4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah..	15
4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan.....	15
BAB V PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOSES 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA.....	17
5.1. Penjelasan Atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	17
5.1.1. Belanja Pegawai.....	17
5.1.2. Belanja Barang dan jasa.....	18
5.1.3. Belanja Modal.....	18
5.2. Penjelasan Atas Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis.....	18
BAB VI PENUTUP.....	23
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Memperhatikan Pasal 290 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala OPD menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OPD disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Maksud Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Provinsi Banten selama satu periode pelaporan.

Sedangkan tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika dan Persandian Provinsi Banten adalah dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam pengelolaan pemerintahan yang baik (Good Governance).

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Catatan atas Laporan Keuangan ini berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593).

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017;
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 42 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun

2016 Nomor 42);

17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang/Jasa Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 57);
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 90);
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 201 tentang Pedoman Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ini terbagi atas 6 bagian yaitu terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Bagian ini membahas tentang maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bagian ini membahas kebijakan keuangan dan indikator pencapaian target kinerja APBD.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

Bagian ini membahas ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bagian ini berisi entitas akuntansi, basis akuntansi dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan, penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada OPD.

Bab V Penjelasan atas Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis

Bagian ini berisi rincian dan penjelasan secara umum tentang laporan dimaksud beserta alasan-alasan terdapatnya perbedaan antara jumlah prognosis dengan sisa anggaran.

Bab VI Penutup

BAB II

INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Indikator Pencapaian Target Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan indikator kinerja harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. terikat pada tujuan, sasaran program dan menggambarkan capaian hasil;
2. harus dibatasi pada hal-hal yang vital dan penting bagi pengambilan keputusan;
3. diutamakan pada hal-hal yang perlu mendapat prioritas;
4. dikaitkan dengan sistem pertanggungjawaban yang memperlihatkan hasil dari kegiatan.

Adapun jenis-jenis indikator kinerja yaitu :

1. Indikator masukan (input);
2. Indikator keluaran (output);
3. Indikator hasil (out come);
4. Indikator manfaat (benefit);
5. Indikator dampak (impact).

Pada Tahun Anggaran 2020 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten berdasarkan APBD Tahun Anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 37.689.363.315,- dimaksud untuk membiayai Belanja Tidak Langsung, terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Langsung terdiri dari 5 program dan 18 kegiatan, sebagai berikut :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan;
2. Program Pengembangan, Pendayagunaan, Peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
3. Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik;
4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah;

5. Program Tata Kelola Persandian

Adapun bentuk-bentuk kegiatan dari ke 5 program dimaksud, yaitu :

1. Program Tata Kelola Pemerintahan

- a. Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset;
- b. Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur;
- d. Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan;
- e. Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran;

2. Program Pengembangan Pendayagunaan Peningkatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi

- a. Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik;
- b. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Kegiatan Pendayagunaan dan Pemanfaatan TIK;
- d. Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Infrastruktur TIK;
- e. Kegiatan Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- f. Kegiatan Pembangunan, Integrasi dan Interprobabilitas;

3. Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik ;

- a. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik;
- b. Kegiatan Kemitraan Komunikasi Publik;
- c. Kegiatan Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik;
- d. Kegiatan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Kegiatan Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik;

4. Program Penyediaan Data Pembangunan Daerah ;

- a. Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral;

5. Program Tata Kelola Persandian ;

a. Kegiatan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi;

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi, Informatik, Statistika dan Persandian Provinsi Banten

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistika Dan Persandian Provinsi Banten melaksanakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terdiri dari 5 program dan 18 kegiatan. Adapun Pagu Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten untuk melaksanakan 18 kegiatan dimaksud sebesar Rp. 37.689.363.315,-.

Berikut diuraikan Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten berdasarkan pelaksanaan kegiatan, antara lain:

A. Belanja Tidak Langsung :

Belanja Tidak Langsung, rencana biaya sebesar Rp. 16.013.265.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.480.439.128,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 40,47%;

B. Belanja Langsung:

1. *Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset*, rencana biaya sebesar Rp. 19.150.446,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.755.000,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 35,27%;
2. *Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan*, rencana biaya sebesar

- Rp. 136.606.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 91.065.500,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 66,66%;
3. *Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur*, rencana biaya sebesar Rp. 4.000.000,- realisasi belanja sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.294.900,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 32,37%;
 4. *Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan*, rencana biaya sebesar Rp. 826.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 826.000,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 100%;
 5. *Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran*, rencana biaya sebesar Rp. 4.849.827.340,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.389.614.637,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 49,27%;
 6. *Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik*, rencana biaya sebesar Rp. 423.180.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 311.347.800,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 73,57%;
 7. *Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi*, rencana biaya sebesar Rp. 6.900.923.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.972.139.430,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 43,07%;
 8. *Kegiatan Pendayagunaan dan Pemanfaatan TIK*, rencana biaya sebesar Rp. 38.370.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 36.603.600,- dengan

demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 95,40%;

9. *Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Infrastruktur TIK*, rencana biaya sebesar Rp. 952.654.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 540.675.000,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 56,75%;
10. *Kegiatan Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi*, rencana biaya sebesar Rp. 1.616.073.502,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 425.202.101,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 26,31%;
11. *Kegiatan Pembangunan, Integrasi dan Interprobabilitas*, rencana biaya sebesar Rp. 559.237.827,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 380.765.000,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 68,09%;
12. *Kegiatan Pelayanan Informasi Publik*, rencana biaya sebesar Rp. 133.965.680,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 91.786.974,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 68,52%;
13. *Kegiatan Kemitraan Komunikasi Publik*, rencana biaya sebesar Rp. 136.875.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 71.828.000,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 52,48%;
14. *Kegiatan Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik*, rencana biaya sebesar Rp. 753.242.400,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 139.193.750,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 18,48%.
15. *Kegiatan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik*, rencana biaya sebesar Rp. 1.663.840.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan

II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 837.605.153,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 50,34%.

16. *Kegiatan Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik*, rencana biaya sebesar Rp. 2.940.575.720,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 326.909.717,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 11,12%.
17. *Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral*, rencana biaya sebesar Rp. 290.698.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 135.298.000,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 46,54%.
18. *Kegiatan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi*, rencana biaya sebesar Rp. 256.053.400,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 150.803.400,- dengan demikian tingkat capaian kinerja keuangan, yaitu sebesar 58,90%.

Berdasarkan uraian Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan, capaian kinerja keuangan dapat digambarkan pada tabel berikut

No.	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
1	Belanja Tidak Langsung	16.013.265.000,00	6.480.439.128,00	40,47	9.532.825.872,00	59,53
2	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset	19.150.446,00	6.755.000,00	35,27	12.395.446,00	64,73
3	Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	136.606.000,00	91.065.500,00	66,66	45.540.500,00	33,34
4	Peningkatan Kapasitas Aparatur	4.000.000,00	1.294.900,00	32,37	2.705.100,00	67,63
5	Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan	826.000,00	826.000,00	100,00	-	-

No.	Nama Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Keuangan		Sisa Anggaran	
			(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6	7
6	Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	4.849.827.340,00	2.389.614.637,00	49,27	2.460.212.703,00	50,73
7	Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik	423.180.000,00	311.347.800,00	73,57	111.832.200,00	26,43
8	Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	6.900.923.000,00	2.972.139.430,00	43,07	3.928.783.570,00	56,93
9	Pendayagunaan dan Pemanfaatan TIK	38.370.000,00	36.603.600,00	95,40	1.766.400,00	4,60
10	Pengelolaan Pemanfaatan Infrastruktur TIK	952.654.000,00	540.675.000,00	56,75	411.979.000,00	43,25
11	Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.616.073.502,00	425.202.101,00	26,31	1.190.871.401,00	73,69
12	Pembangunan, Integrasi dan Interprobabilitas	559.237.827,00	380.765.000,00	68,09	178.472.827,00	31,91
13	Pelayanan Informasi Publik	133.965.680,00	91.786.974,00	68,52	42.178.706,00	31,48
14	Kemitraan Komunikasi Publik	136.875.000,00	71.828.000,00	52,48	65.047.000,00	47,52
15	Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik	753.242.400,00	139.193.750,00	18,48	614.048.650,00	81,52
16	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	1.663.840.000,00	837.605.153,00	50,34	826.234.847,00	49,66
17	Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik	2.940.575.720,00	326.909.717,00	11,12	2.613.666.003,00	88,88
18	Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral	290.698.000,00	135.298.000,00	46,54	155.400.000,00	53,46
19	Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi	256.053.400,00	150.803.400,00	58,90	105.250.000,00	41,10
JUMLAH		37.689.363.315	15.390.153.090	40,83	22.299.210.225	59,17

Sumber : diolah dari Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Dalam pencapaian target kinerja Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten terdapat beberapa permasalahan, diantaranya adalah :

1. Secara umum semua program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditetapkan;
2.
 - Masa Peralihan Kasda Pemerintah Provinsi Banten
 - Penerbitan Keputusan Gubernur Tentang Pengelola Keuangan, dll
 - Adanya ketidaksesuaian antara kegiatan dengan uraian tugas
 - Adanya ketidaksesuaian target fisik dengan alokasi anggaran
 - Adanya ketidaksesuaian nomenklatur kegiatan
 - Waktu mulai efektif pelaksanaan kegiatan kurang lebih pertengahan Februari 2020

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Keuangan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten Provinsi yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 37.689.363.315,- untuk melaksanakan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terdiri dari 5 Program yang terbagi dalam 18 Kegiatan Belanja Langsung. Penyusunan Laporan Keuangan ini menggunakan Sistem Akuntansi Aplikasi SIMRAL (Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan 2020) dari Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT)

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah OPD dan SKPKD, dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Provinsi Banten yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas

dikeluarkan oleh kas daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

BAB V

PENJELASAN ATAS LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PROGNOSIS 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Realisasi Anggaran

Secara garis besar belanja daerah dibagi menjadi 2 jenis yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja untuk gaji pegawai dan tunjangan penghasilan berdasarkan beban kerja, sedangkan belanja langsung adalah belanja yang membiayai program dan kegiatan di lingkungan OPD.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten mengalokasikan belanja untuk membiayai belanja tidak langsung dan belanja langsung, terdiri atas :

5.1.1. Belanja Pegawai

Untuk Belanja Pegawai ada 2 kategori, yaitu untuk (a) Belanja Pegawai pada pos Belanja Tidak Langsung untuk membayar gaji, tunjangan dan uang kinerja bagi pegawai pegawai (b) Belanja Pegawai pada pos Belanja Langsung untuk membiayai kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten.

Pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 alokasi Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung) untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten sebesar Rp. 16.013.265.000,-. Pada akhir Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 (30 Juni 2020) Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 6.480.439.128,- atau sebesar 40,47% dari alokasi Belanja dan untuk Belanja Pegawai dari Belanja Langsung sebesar Rp. 1.486.800.000,-. Pada akhir Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 (30 Juni 2020) Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 755.800.000,- atau sebesar 50,73%.

5.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa untuk Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 16.909.636.705,- yang digunakan untuk membiayai 18 kegiatan. Pada akhir Semester I Tahun Anggaran 2020 (30 Juni 2020) Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 7.656.813.962,- atau sebesar 45,28% dari total alokasi Belanja.

5.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 3.279.661.610,- yang digunakan untuk membiayai kegiatan, dalam bentuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan software dan biaya pendukung lainnya. Pada akhir Semester I Tahun Anggaran 2020 (30 Juni 2020) Realisasi Belanja Modal masih sebesar Rp. 497.100.000,- atau sebesar 15,16%.

5.2. Penjelasan Atas Laporan Semester Pertama APBD dan Prognosis 6 (Enam) Bulan Berikutnya

Realisasi anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten Provinsi Banten pada periode Semester Pertama APBD Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 15.390.153.090,- atau 40,83% dari pagu anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten **Prognosis Belanja dicatat berdasarkan sisa anggaran setelah dikurangkan :**

- a. Sisa kontrak atas pekerjaan-pekerjaan yang sudah direalisasikan sampai dengan semester pertama;
- b. Kegiatan atau anggaran yang direncanakan dilakukan/diserap pada semester pertama maupun semester kedua tetapi dengan alasan-alasan tertentu, tidak jadi atau tidak akan dilaksanakan/diserap.

Pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Banten Provinsi Banten, Laporan Realisasi Semester Pertama dan Prognosis per kegiatan, diuraikan sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung :

Belanja Belanja Tidak Langsung, rencana biaya sebesar Rp. 16.013.265.000,- realisasi belanja sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.480.439.128,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sama dengan sisa anggaran semester I (satu) sebesar Rp. 9.532.825.872,-

B. Belanja Langsung :

1. *Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset*, rencana biaya sebesar Rp. 19.150.446,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 6.755.000,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 12.395.446,- ;
2. *Kegiatan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan*, rencana biaya sebesar Rp. 136.606.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 91.065.500,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 45.540.500,- ;
3. *Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur*, rencana biaya sebesar Rp. 4.000.000,- realisasi belanja sampai dengan Semester I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.294.900,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 2.705.100,- ;
4. *Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan Pelayanan Perpustakaan*, rencana biaya sebesar Rp. 826.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 826.000,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 0,- ;

5. *Kegiatan Penyediaan Barang Jasa, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran*, rencana biaya sebesar Rp. 4.849.827.340,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.389.614.637,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 2.460.327.703,- ;
6. *Kegiatan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik*, rencana biaya sebesar Rp. 423.180.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 311.347.800,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 111.832.200,- ;
7. *Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi*, rencana biaya sebesar Rp. 6.900.923.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.972.139.430,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 3.928.783.570,- ;
8. *Kegiatan Pendayagunaan dan Pemanfaatan TIK*, rencana biaya sebesar Rp. 38.370.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 36.603.600,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 0,- ;
9. *Kegiatan Pengelolaan Pemanfaatan Infrastruktur TIK*, rencana biaya sebesar Rp. 952.654.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 540.675.000,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 411.979.000,- ;
10. *Kegiatan Standarisasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi*, rencana biaya sebesar Rp. 1.616.073.502,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 425.202.101,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 1.175.179.391,;

11. *Kegiatan Pembangunan, Integrasi dan Interprobabilitas*, rencana biaya sebesar Rp. 559.237.827,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 380.765.000,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 178.472.827,- ;
12. *Kegiatan Pelayanan Informasi Publik*, rencana biaya sebesar Rp. 133.965.680,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 91.786.974,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 42.178.706,- ;
13. *Kegiatan Kemitraan Komunikasi Publik*, rencana biaya sebesar Rp. 136.875.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 71.828.000,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 65.047.000,- ;
14. *Kegiatan Pengelolaan Aspirasi dan Opini Publik*, rencana biaya sebesar Rp. 753.242.400,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 139.193.750,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 614.048.650,- ;
15. *Kegiatan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik*, rencana biaya sebesar Rp. 1.663.840.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 837.605.153,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 827.989.847,- ;
16. *Kegiatan Pengelolaan dan Penyebaran Informasi Publik*, rencana biaya sebesar Rp. 2.940.575.720,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 326.909.717,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 2.530.466.003,- ;
17. *Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Sektoral*, rencana biaya sebesar Rp. 290.698.000,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.

135.298.000,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 155.400.000,- ;

18. *Kegiatan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi*, rencana biaya sebesar Rp. 256.053.400,- realisasi belanja sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 150.803.400,- dengan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya sebesar Rp. 105.250.000,- ;

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Pasal 290 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala OPD menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) OPD disertai prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Laporan Keuangan Triwulan II (Semester I) Tahun Anggaran 2020 ini telah disusun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan dan memperbandingkan anggaran yang diterimanya.

Realisasi anggaran belanja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten pada periode akhir Semester I (30 Juni 2020) Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 15.390.153.090,- atau 40,83% dari pagu anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian

2. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan

pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya dan informasi tambahan yang diperlukan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan, dalam hal ini pengesahan/pembebanan di Bidang Perbendaharaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Pengguna Anggaran. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih